

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 15
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 11.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil Badan Anggaran
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 44 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan);
 2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 3. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 4. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 5. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 6. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 7. Laksma TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);

8. Dr. Kusdiantoro, M.Sc. (Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Muhammad Yusuf, M.Si. (Kuasa Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Persero);
12. Sigit Muhartono, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
13. Achmad Ardianto, Direktur Utama PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil Badan Anggaran, dibuka pukul 11.15 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp586.852.843.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp82.552.663.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp792.186.368.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.126.150.911.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
 - e. **Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp903.734.145.000,00 (sembilan ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp377.207.204.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah);

- g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp378.741.417.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.375.102.199.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp493.439.646.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat armada kapal pengawas dan menambah hari operasi berlayar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka melindungi wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi pelanggaran dan pencurian (*IUU Fishing*), khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghidupkan kembali teknologi pada Balai Riset dan Observasi Laut Perancak Kabupaten Jembrana Provinsi Bali secara bertahap, selain teknologi untuk pendeteksian kapal yang berpotensi melakukan *IUU Fishing* dan teknologi memantau pencemaran minyak di laut (*oil spill*).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendalaman dengan menjelaskan secara detail konsep budi daya udang (*shrimp estate*) berbasis kawasan kepada Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan melalui *Focus Grup Discussion* dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan sekolah pendidikan vokasi kelautan dan perikanan agar tetap berada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana terdapat adanya wacana akan dipusatkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen penuh melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2022 dengan menyiapkan langkah-langkah konkrit secara sistematis melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang terukur, tepat sasaran, dan mampu melakukan resiliensi yang sifatnya adaptif dan berkelanjutan di masa pandemi COVID-19.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan perikanan budi daya di daerah yang mempunyai potensi budi daya perairan darat dengan pendekatan kearifan lokal, seperti ikan hias dan sebagainya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Sakti Wahyu Trenggono

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151